



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NELWAN MALORING**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **664965**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **977.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 811 m2/63 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN TALAUD, Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN TALAUD, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.121 m2/1.121 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN TALAUD, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2.175 m2/2.175 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN TALAUD, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 6.729 m2/6.729 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN TALAUD, HASIL SENDIRI , Rp. 45.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 5.500 m2/5.500 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN TALAUD, Rp. 75.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1.128 m2/1.128 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN TALAUD, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 2.032 m2/2.032 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN TALAUD, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 2.575 m2/2.575 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN TALAUD, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **165.000.000**



1. MOBIL, KIJANG STATION WAGON Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV 2 WD 2.0 MT Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.179.736

F. HARTA LAINNYA Rp. 25.000.000

Sub Total Rp. 1.202.179.736

III. HUTANG Rp. 607.434.715

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 594.745.021

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.